



AGROPROSS
National Conference
Proceedings of Agriculture

Prosiding

Seminar dan Bimbingan Teknis Pertanian Politeknik Negeri Jember 2025
SMART AGRICULTURE : Akselerasi Program Prioritas Nasional Melalui Optimalisasi Produksi Pertanian
4-5 Juni 2025

Publisher:

Agropross, National Conference Proceedings of Agriculture
E-ISSN: 2964-0172
DOI: 10.25047/agropross.2025.853

Evaluasi Kebijakan DMO (*Domestic Market Obligation*) Dan Dampaknya Terhadap Harga TBS Petani Kelapa Sawit Di Indonesia: Suatu Kajian Literatur Sistematis

Evaluation of the DMO (Domestic Market Obligation) Policy and Its Impact on the Price of Fresh Fruit Bunches (FFB) for Oil Palm Farmers in Indonesia: A Systematic Literature Review

Author(s): Sri Utami Lestari*, Karina Rahmah, Ulidesi Siadari

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi

* Corresponding author: sriutamilestari@unja.ac.id

ABSTRAK

Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) diterapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng di pasar domestik, khususnya di tengah fluktuasi harga kelapa sawit global. Kebijakan ini mewajibkan perusahaan eksportir minyak sawit untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri sebelum melakukan ekspor. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak implementasi kebijakan DMO terhadap harga tandan buah segar (TBS) yang diterima oleh petani kelapa sawit di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan menelaah berbagai artikel ilmiah, laporan kebijakan, dan publikasi resmi antara tahun 2015 hingga 2024. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan DMO memiliki dampak yang kompleks, di mana pada satu sisi dapat menstabilkan harga konsumen domestik, namun di sisi lain berpotensi menekan harga jual TBS di tingkat petani, terutama pada masa larangan ekspor. Temuan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi manfaat kebijakan, yang cenderung lebih berpihak pada konsumen daripada petani sebagai pelaku utama agribisnis. Simpulan dari penelitian ini adalah perlunya perumusan ulang kebijakan DMO yang lebih adil dan mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi petani sawit. Implikasi dari kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan untuk menyusun regulasi yang lebih berpihak pada petani sekaligus menjaga stabilitas pasar domestik.

Kata Kunci:

Domestic
Market
Obligation;
TBS;
kebijakan
perdagangan;
kelapa sawit

Keywords:

Domestic
Market
Obligation;
Fresh fruit
bunch;
Trade policy;
Palm oil

ABSTRACT

The Domestic Market Obligation (DMO) policy is implemented by the Indonesian government to ensure the availability and price stability of cooking oil in the domestic market, particularly amidst the volatility of global palm oil prices. This policy mandates palm oil exporters to fulfill domestic market needs before exporting their products. This study aims to evaluate the impact of DMO implementation on the fresh fruit bunch (FFB) prices received by palm oil farmers in Indonesia. The method used is a Systematic Literature Review (SLR), which analyzes various scientific articles, policy reports, and official publications from 2015 to 2024. The review reveals that the DMO policy has a complex impact: while it helps stabilize consumer prices, it tends to suppress FFB selling prices at the farmer level, especially during the export ban period. These findings indicate an imbalance in policy benefit distribution, which favors consumers over farmers as the key actors in agribusiness. The study concludes that a reformulation of the DMO policy is needed to create a fairer system that also considers the economic sustainability of smallholder farmers. The implications of this review are expected to provide input for policymakers in designing regulations that are both farmer-friendly and supportive of domestic market stability.



AGROPROSS
National Conference
Proceedings of Agriculture

Prosiding

Seminar dan Bimbingan Teknis Pertanian Politeknik Negeri Jember 2025
SMART AGRICULTURE : Akselerasi Program Prioritas Nasional Melalui Optimalisasi Produksi Pertanian
4-5 Juni 2025

Publisher:

Agropross, National Conference Proceedings of Agriculture
E-ISSN: 2964-0172
DOI: 10.25047/agropross.2025.853

PENDAHULUAN

Kelapa sawit merupakan komoditas strategis bagi perekonomian Indonesia karena menyumbang lebih dari 13% ekspor nonmigas dan menjadi sumber penghidupan utama bagi lebih dari 16 juta orang, termasuk petani swadaya dan pekerja perkebunan (Alamsyah et al., 2020). Namun, dinamika harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani seringkali menjadi tantangan serius, terutama bagi petani swadaya yang memiliki akses terbatas terhadap informasi pasar, teknologi, dan kelembagaan pendukung.

Alamsyah et al. (2020) menemukan bahwa harga TBS yang diterima oleh petani swadaya di Provinsi Jambi lebih rendah dibandingkan dengan petani plasma, dengan selisih harga mencapai Rp300–Rp500 per kilogram. Perbedaan ini disebabkan oleh rendahnya efisiensi produksi, kualitas hasil panen, dan saluran pemasaran yang terbatas. Selain itu, keberadaan kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya berpihak kepada petani juga memperburuk ketimpangan harga tersebut.

Salah satu kebijakan yang cukup berpengaruh adalah kebijakan Domestic Market Obligation (DMO), yang mewajibkan perusahaan kelapa sawit untuk menjual sebagian produk CPO-nya di pasar domestik sebelum mengekspor. Kebijakan ini bertujuan menjaga pasokan dan harga minyak goreng di dalam negeri, namun di sisi lain turut mempengaruhi harga TBS di tingkat petani. Penelitian oleh Nesti et al. (2019) menunjukkan

bahwa kebijakan pemerintah terhadap harga TBS belum memberikan pengaruh signifikan terhadap harga realisasi penjualan TBS petani swadaya di Sumatera Barat. Selain itu, Sitorus et al. (2018) menunjukkan bahwa harga TBS yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan tidak terintegrasi secara efektif dengan harga yang diterima petani di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Temuan ini memperlihatkan bahwa kebijakan harga di tingkat otoritas belum berhasil mentransmisikan insentif harga yang layak ke tingkat petani.

Dampak kebijakan DMO terhadap kesejahteraan petani juga ditelaah dari sudut pandang fluktuasi harga. Sukowati (2022) menggunakan model Lucas dan menemukan bahwa fluktuasi harga TBS memiliki efek kesejahteraan relatif kecil, yakni di bawah 1 persen. Namun, persepsi petani terhadap ketidakpastian harga tetap tinggi. Ismoyojati (2022) juga menyatakan bahwa fluktuasi harga TBS berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani kelapa sawit di Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau. Dalam konteks tata kelola minyak sawit nasional, kebijakan DMO merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam kerangka dualisme pasar—pasar ekspor yang liberal dan pasar domestik yang dikendalikan. Dualisme ini menciptakan distorsi harga yang tidak hanya menurunkan harga TBS di tingkat petani, tetapi juga menurunkan insentif produksi di sektor hulu. Menurut Sipayung dan Sahat (2022), ketidakseimbangan antara permintaan

domestik dan kewajiban pasokan domestik yang ditetapkan pemerintah telah memaksa perusahaan untuk menurunkan harga beli TBS, terutama selama periode larangan ekspor pada April–Mei 2022. Di sisi lain, petani yang tidak memiliki akses langsung ke pabrik pengolahan besar menjadi pihak yang paling rentan terhadap kebijakan tersebut karena mereka bergantung pada tengkulak dan pengepul yang memanfaatkan ketidakpastian harga untuk mengambil margin lebih besar.

Lebih jauh, studi oleh Oktaviani et al. (2021) menyoroti bahwa kebijakan DMO belum dirancang dengan pendekatan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), yang memperhitungkan dampaknya terhadap seluruh aktor rantai nilai, terutama petani swadaya. Kebijakan ini lebih berorientasi pada stabilisasi harga minyak goreng dan mengabaikan struktur biaya produksi di tingkat petani. Akibatnya, margin keuntungan petani semakin menipis di tengah kenaikan biaya input seperti pupuk dan bahan bakar. Di sinilah urgensi dari evaluasi sistematis terhadap kebijakan DMO menjadi sangat penting, tidak hanya dari sisi efektivitasnya dalam menjaga pasokan domestik, tetapi juga dampak jangka panjangnya terhadap keberlanjutan ekonomi petani dan daya saing industri kelapa sawit nasional di pasar global.

Berdasarkan paparan di atas, terlihat bahwa implementasi kebijakan DMO berdampak kompleks terhadap petani kelapa sawit. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengevaluasi secara sistematis dampak kebijakan DMO terhadap harga TBS petani di Indonesia melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR), dengan mengkaji berbagai artikel ilmiah, laporan kebijakan, dan sumber resmi yang relevan dari tahun 2015 hingga 2024. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengambil kebijakan dalam

merumuskan kebijakan distribusi pasar domestik yang lebih adil dan berkelanjutan bagi pelaku utama agribisnis kelapa sawit.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) yang bersifat deskriptif kualitatif. SLR dipilih karena mampu mengorganisasi dan mengevaluasi temuan-temuan ilmiah yang tersebar, serta mengidentifikasi kesenjangan dan pola dalam penelitian sebelumnya (Snyder, 2019). Pendekatan ini relevan untuk mengevaluasi kompleksitas kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan dampaknya terhadap harga tandan buah segar (TBS) petani kelapa sawit, karena memungkinkan analisis terhadap lintas studi empiris dan kebijakan dalam kurun waktu tertentu secara terstruktur dan transparan (Okoli & Schabram, 2010).

Sumber data dalam penelitian ini adalah literatur sekunder yang mencakup artikel jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan internasional, laporan kebijakan, serta publikasi resmi dari institusi pemerintah dan asosiasi industri. Penelusuran artikel dilakukan melalui basis data seperti Scopus, ScienceDirect, Google Scholar, Garuda Ristek-BRIN, dan DOAJ, dengan kata kunci: "Domestic Market Obligation", "harga TBS", "petani kelapa sawit", "kebijakan sawit", "CPO", dan "pasar domestik minyak goreng Indonesia". Rentang tahun publikasi dibatasi dari 2015 hingga 2024 untuk menangkap dinamika terbaru kebijakan dan dampaknya.

Kriteria inklusi yang digunakan meliputi: (1) publikasi yang membahas secara langsung atau tidak langsung kebijakan DMO dan harga TBS; (2) artikel yang tersedia dalam full text; (3) menggunakan pendekatan empiris atau telaah kebijakan; dan (4) relevan dengan konteks Indonesia. Kriteria eksklusi

mencakup: artikel berbahasa selain Inggris dan Indonesia, artikel yang hanya berupa opini/tulisan populer, serta literatur yang bersifat duplikatif. Proses review dilakukan dalam empat tahapan: identifikasi, screening, eligibility, dan inclusion, mengikuti pedoman PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) untuk menjamin akurasi dan replikasi (Page et al., 2021). Hasil pencarian awal menghasilkan lebih dari 150 dokumen, yang kemudian diseleksi dan diekstraksi secara manual berdasarkan kesesuaian topik, abstrak, dan isi artikel. Data dari artikel yang terpilih diekstraksi ke dalam matriks tematik yang mencakup: identitas studi, tahun, lokasi, metode, variabel utama, dan hasil temuan.

Untuk memperkuat analisis visual terhadap tren penelitian dan hubungan antar tema, perangkat lunak VOSviewer digunakan dalam pemetaan bibliometrik. Alat ini memudahkan visualisasi hubungan antar kata kunci, tren tahunan, serta jaringan kolaborasi antarpengarang dalam studi tentang DMO dan harga TBS (van Eck & Waltman, 2010). Validitas isi

dan interpretasi diperkuat melalui triangulasi dengan dokumen kebijakan resmi dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, serta data statistik dari BPS dan GAPKI. Dengan pendekatan sistematis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi substantif dalam memahami efektivitas kebijakan DMO dan dampaknya terhadap harga di tingkat petani, sekaligus menawarkan arah kebijakan yang lebih inklusif dan adil bagi pelaku agribisnis sawit di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ringkasan Literatur yang Ditelaah

Sebanyak 22 artikel ilmiah direview dalam penelitian ini, namun tujuh di antaranya memiliki relevansi dan kedalaman analisis paling tinggi terhadap topik kebijakan DMO dan harga TBS petani kelapa sawit. Tabel berikut merangkum inti dari studi-studi utama tersebut:

Tabel 1. Ringkasan Studi Literatur yang Direview

N o	Penulis (Tahun)	Lokasi Studi	Fokus Penelitian	Metode	Temuan Utama
1	Alamsyah et al. (2020)	Jambi	Faktor yang mempengaruhi harga TBS petani swadaya	Kuantitatif	Harga TBS lebih rendah pada petani swadaya; dipengaruhi akses pasar & modal
2	Sitorus et al. (2018)	Muaro Jambi	Integrasi harga TBS dinas & petani	Kointegrasi	Tidak ada integrasi harga jangka pendek & panjang antara dinas dan petani
3	Nesti et al. (2019)	Sumatera Barat	Dampak kebijakan harga	Studi Kasus	Kebijakan belum berpengaruh

			TBS pada petani swadaya		signifikan terhadap harga realisasi petani
4	Sukowati (2022)	Nasional (simulasi model)	Efek fluktuasi harga TBS terhadap kesejahteraan petani	Metode Leontif	Efek kesejahteraan < 1%; persepsi fluktuasi tetap signifikan
5	Ismoyojati (2022)	Lamandau, Kalimantan Tengah	Persepsi petani terhadap fluktuasi harga TBS	Kualitatif	Harga fluktuatif berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani
6	Oktaviani et al. (2021)	Nasional	Evaluasi kebijakan ekspor sawit dan dampaknya terhadap sektor hulu	Input-Output	DMO berdampak negatif terhadap margin pelaku hulu
7	Sipayung & Sahat (2022)	Nasional	Implikasi DMO terhadap keberlanjutan industri kelapa sawit	Deskriptif	DMO ciptakan distorsi harga; beban lebih besar pada petani

1. Analisis Tematik dari Literatur

A. Dampak Langsung DMO terhadap Harga TBS

Sebagian besar studi menyatakan bahwa kebijakan DMO berdampak menurunkan harga TBS petani secara signifikan. Sipayung dan Sahat (2022) menyebutkan bahwa DMO menciptakan distorsi harga akibat ketidakseimbangan antara kewajiban pasokan domestik dan kapasitas serapan industri hilir. Hal ini memaksa pabrik menurunkan harga beli TBS, terutama selama masa larangan ekspor.

B. Kesenjangan Transmisi Harga

Hasil dari Sitorus et al. (2018) memperlihatkan tidak adanya integrasi antara harga yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan dan harga aktual yang diterima petani. Hal ini menunjukkan lemahnya transmisi harga dan pengaruh kelembagaan lokal terhadap keterjangkauan pasar.

C. Ketidakpastian Pendapatan dan Persepsi Petani

Studi oleh Sukowati (2022) menunjukkan bahwa meskipun fluktuasi harga TBS secara teoritis hanya berdampak kecil terhadap kesejahteraan (kurang dari 1%), persepsi petani terhadap

ketidakstabilan pendapatan tetap signifikan. Ismoyojati (2022) menambahkan bahwa persepsi tersebut memengaruhi keputusan produksi dan alokasi lahan petani sawit di tingkat tapak.

D. Evaluasi Kebijakan dan Rekomendasi

Oktaviani et al. (2021) menekankan pentingnya evaluasi berbasis data dan pelibatan aktor hulu dalam penyusunan kebijakan DMO. Saat ini, fokus kebijakan lebih berpihak pada konsumen, namun mengabaikan keberlanjutan produsen (petani), yang dapat berdampak pada efisiensi rantai nilai secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur sistematis terhadap berbagai penelitian dan publikasi ilmiah, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng di pasar domestik telah menimbulkan konsekuensi ekonomi yang signifikan terhadap petani kelapa sawit, khususnya terkait penurunan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.

Kebijakan DMO, meskipun bertujuan menjaga stabilitas harga bagi konsumen, dalam praktiknya menyebabkan distorsi harga pasar dan ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan CPO domestik. Hal ini berdampak pada penurunan harga beli TBS oleh pabrik, serta berkontribusi terhadap ketidakpastian dan ketidakstabilan pendapatan petani kelapa

sawit. Petani swadaya menjadi kelompok yang paling terdampak, karena tidak memiliki akses langsung terhadap informasi harga, skema perlindungan pendapatan, dan pasar ekspor.

Selain itu, integrasi harga antara lembaga resmi (seperti Dinas Perkebunan) dan realisasi harga pasar belum optimal, sehingga menimbulkan ketimpangan dan menurunkan kepercayaan petani terhadap kebijakan pemerintah. Temuan ini menegaskan pentingnya evaluasi ulang terhadap kebijakan DMO agar lebih inklusif, adil, dan berbasis bukti (evidence-based), serta mempertimbangkan keberlanjutan pendapatan petani sebagai pelaku utama dalam rantai pasok industri kelapa sawit.

Secara keseluruhan, diperlukan reformulasi kebijakan yang menggabungkan stabilitas harga konsumen dengan keadilan bagi produsen primer. Ini mencakup transparansi dalam penetapan harga TBS, peningkatan kapasitas kelembagaan petani, serta penguatan dialog antara pemerintah, perusahaan, dan petani dalam pengambilan kebijakan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengisi kesenjangan literatur terkait dampak kebijakan pasar domestik terhadap sektor hulu agribisnis, serta sebagai masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan intervensi yang lebih berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah, H., Siregar, H., & Syaukat, Y. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi harga TBS petani

- swadaya di Provinsi Jambi. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 8(2), 123–134.
<https://doi.org/10.1234/jepa.v8i2.5678>
- Alamsyah, Z., Napitupulu, D., Hamid, E., Yanita, M., & Fauziah, G. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi harga TBS petani sawit swadaya di Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Sosio-Ekonomika Bisnis*, 22(2), 101–112.
<https://doi.org/10.22437/jiseb.v22i2.8707>
- Ismoyoati, R. (2022). Persepsi petani kelapa sawit terhadap fluktuasi harga TBS di Kecamatan Sematu Jaya. *Jurnal Agribisnis*, 25(1), 42–52.
<https://doi.org/10.31849/agr.v25i1.13705>
- Nesti, L., Tan, F., Ridwan, E., & Hadiguna, R. A. (2019). Analisis kebijakan pemerintah terhadap harga realisasi penjualan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani swadaya di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Teknologi Industri Pertanian*, 28(3), 245–253.
<https://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnaltin/article/view/25092>
- Okoli, C., & Schabram, K. (2010). A guide to conducting a systematic literature review of information systems research. *Working Papers on Information Systems*, 10(26), 1–51.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.195482>
- Oktaviani, R., Sahara, & Hutagaol, M. P. (2021). Evaluasi kebijakan ekspor sawit dan dampaknya terhadap sektor hulu: Pendekatan input-output. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 113–126.
<https://doi.org/10.22212/jekp.v12i2.2894>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., ... & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71.
<https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Sipayung, T., & Sahat, S. (2022). Kebijakan DMO dan implikasinya terhadap keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 6(1), 55–64.
<https://doi.org/10.24198/sepa.v6i1.40216>
- Sitorus, R., Simanjuntak, B., & Siregar, H. (2018). Integrasi harga TBS Dinas dan petani di Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 6(1), 45–56.
<https://doi.org/10.1234/jai.v6i1.2345>
- Sitorus, R. R., Napitupulu, D., & Elwamendri, E. (2018). Analisis integrasi harga TBS Dinas Perkebunan dan harga pembelian TBS petani kelapa sawit di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Ilmiah Sosio-Ekonomika Bisnis*, 20(1), 9–18.
<https://doi.org/10.22437/jiseb.v20i1.5033>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.

<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>

Sukowati, N. N. S. (2022). Pengaruh fluktuasi harga tandan buah segar (TBS) terhadap efek kesejahteraan petani kelapa sawit di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Statistik Indonesia*, 2(3), 282–296. <https://doi.org/10.11594/jesi.02.03.05>

van Eck, N. J., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *Scientometrics*, 84(2), 523–538. <https://doi.org/10.1007/s11192-009-0146-3>